

Analisis Implementasi Prinsip Prinsip Good Corporate Governance Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bogor Tegar Beriman

Munadi Natanegara¹, Dedi Kurnia Syah Putra²

¹ Hubungan Masyarakat, Fakultas Komunikasi dan Bisnis, Universitas Telkom, Indonesia, natanegara@student.telkomuniversity.ac.id

² Hubungan Masyarakat, Fakultas Komunikasi dan Bisnis, Universitas Telkom, Indonesia, dedikurniasp@telkomuniversity.ac.id

Abstract

This study evaluates the implementation of the five principles of Good Corporate Governance (GCG) at PT BPRS BTB. Despite good implementation, there is still a lack of information transparency, especially on websites and social media. Complaints also include a lack of information about programs, performance audits and community oversight. Nonetheless, BPRS BTB has positive aspects such as improving financial performance through the BUMD program for MSMEs and good customer service. Even though they are committed to contributing to the government, the lack of Corporate Social Responsibility (CSR) programs and the issue of nepotism in recruitment are also highlighted in this study. In the context of Islamic corporate culture, this culture has a positive impact on work efficiency and employee ethics, but there are also problems that arise such as acts of nepotism in employee recruitment.

Keywords-good corporate governance, implementation, BUMD

Abstrak

Penelitian ini mengevaluasi implementasi lima prinsip Good Corporate Governance (GCG) di PT BPRS BTB. Meskipun implementasi sudah baik, masih ada kekurangan dalam transparansi informasi, terutama di situs web dan media sosial. Keluhan juga mencakup kurangnya informasi tentang program, audit kinerja, dan pengawasan masyarakat. Meskipun demikian, BPRS BTB memiliki aspek positif seperti peningkatan kinerja keuangan melalui program BUMD for UMKM dan pelayanan pelanggan yang baik. Meski berkomitmen pada kontribusi ke pemerintah, kurangnya program Corporate Social Responsibility (CSR) dan isu nepotisme dalam rekrutmen juga menjadi sorotan dalam penelitian ini. Dalam konteks budaya perusahaan islamiah, budaya ini memiliki dampak positif pada efisiensi kerja dan etika karyawan, tetapi juga ada permasalahan yang muncul seperti tindakan nepotisme dalam rekrutmen pegawai.

Kata Kunci-good corporate governance, implementasi, BUMD

I. PENDAHULUAN

Badan Usaha Milik Daerah atau Perusahaan Daerah adalah sebuah perusahaan yang didirikan dan dikelola oleh pemerintah daerah, dimana pemerintah yang memberikan modal seluruhnya atau 50 + 1 % dari total saham, maka dapat dikatakan perusahaan tersebut merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

BUMD menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Daerah. ada dua jenis BUMD yaitu, :

- A. Perusahaan Umum Daerah yang seluruh modal atau investasi dimiliki oleh Daerah dan tidak terbagi atas saham.
- B. Perusahaan Perseroan Daerah adalah perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas yang nilai investasi terbagi menjadi saham, biasanya daerah menanamkan modal sebesar paling kecil 50+1% dari total saham.

PT BPRS BTB dibentuk berdasarkan pada PERDA Kabupaten Bogor No. 20 Tahun 2011 tentang pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. PT BPRS BTB memiliki fungsi untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, menumbuhkan usaha sektor riil terutama pada sekelompok usaha kecil dan mikro, mengembangkan permodalan, menambah lapangan kerja, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), membina semangat ukhuwah islamiyah melalui kegiatan ekonomi, dan melaksanakan semua kegiatan usaha sesuai dengan prinsip syariah dan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan.

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT BPRS Bogor Tegar Beriman berhasil meraih penghargaan sebagai BPRS BUMD terbaik tahun 2021 dengan predikat "The Best" kategori aset 50-100 Miliar. Republik Indonesia dalam hal penilaian. BPRS Bogor Tegar Beriman bersaing dengan 158 BPRS yang beroperasi di Indonesia. Penghargaan yang bergengsi dari Infobank dan adanya keterlibatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Republik Indonesia ini memiliki indikator utama dalam penilaiannya. Indikator tersebut antara lain rasio permodalan, kualitas aset, rentabilitas, likuiditas, efisiensi, serta pertumbuhan dana, pembiayaan, modal, dan laba. Penghargaan tersebut membuktikan bahwa BPRS Bogor Tegar Beriman telah menerapkan tata kelola perusahaan yang sangat baik.

Pada tahun 1999 setelah Indonesia mengalami krisis moneter yang sangat buruk pemerintah membentuk Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance berdasarkan keputusan Menko Ekuin Nomor KEP/31/M.EKUIIN/08/1999 dengan tujuan guna menyiapkan Pedoman Tata Kelola Perusahaan (GCG) yang baik untuk sektor industri agar dapat menyesuaikan dengan perkembangan di dunia

Good Corporate Governance dapat dikatakan dengan kumpulan hukum, peraturan, dan kaidah - kaidah yang mendorong kinerja perusahaan agar berfungsi secara efisien dan menghasilkan nilai ekonomi berjangka panjang (World Bank). Sehingga Good Corporate Governance dapat diartikan sebagai pedoman untuk perusahaan yang wajib diikuti dalam pengelolaan aset - aset perusahaan agar mendapatkan hasil yang efisien dan optimal hingga memberikan keuntungan jangka panjang bagi perusahaan.

II. TINJAUAN LITERATUR

Corporate Governance adalah sebuah sistem, pedoman, atau aturan yang mengatur tata kelola, manajerial, resiko, serta keberlanjutan perusahaan. Dengan kata lain tujuan dari GCG adalah untuk mengelola dan menaikan kinerja perusahaan dalam proses penetapan keputusan, pengelolaan aset serta efisiensi operasional perusahaan.

Perusahaan yang mengimplementasikan GCG yang baik tentunya akan meningkatkan *corporate value* melalui peningkatan kinerja perusahaan serta keuangan dan dapat meminimalisir resiko kepentingan yang berbenturan. Dengan manajerial GCG yang baik sebuah perusahaan akan mendapatkan kepercayaan stakeholder untuk terus mengembangkan perusahaan karena pengendalian hubungan organ perusahaan.

Menurut Siswanto Sutojo (2008:5) tujuan penerapan Good Corporate Governance (GCG) adalah untuk pengelolaan perusahaan yang bertujuan meningkatkan corporate value dengan cara memaksimalkan pengelolaan aset perusahaan agar menghasilkan keuntungan jangka panjang, serta untuk melindungi hak dan kepentingan stakeholder.

Tujuan GCG dengan kata lain bertujuan untuk dapat meningkatkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan perusahaan dengan tetap mempertimbangkan kepentingan pemegang saham dan para pemangku kepentingan lain. Serta dapat mendorong pengembangan perusahaan dan pengelolaan sumber daya yang efektif sehingga menghasilkan keuntungan jangka panjang bagi perusahaan

Menurut Hery (2010) manfaat corporate governance adalah memberikan pedoman tata kelola perusahaan yang secara tidak langsung mendorong pengelolaan aset perusahaan yang efektif dan efisien serta dapat membantu mengurangi tindak kecurangan pada perusahaan.

Dengan kata lain manfaat good corporate governance adalah untuk membantu memberikan pedoman atau landasan yang dapat dipertanggung jawabkan dalam perundang - undangan tentang tata kelola perusahaan. Manfaat lain dari penerapan GCG secara tidak langsung adalah untuk menarik investor datang ke perusahaan. Sedangkan untuk manfaat secara langsungnya adalah untuk Membantu manajemen perusahaan dalam memastikan atau menjamin bahwa perusahaan mematuhi peraturan perundang-undangan perusahaan.

Good Corporate Governance yang sekarang disebut GCG, adalah sebuah tata kelola perusahaan yang memiliki prinsip - prinsip keterbukaan (*Transparency*), akuntabilitas (*Accountability*), tanggung jawab (*Responsibility*), mandiri (*Independent*), adil (*fairness*). Kehadiran Corporate Governance memiliki implikasi yang luas karena corporate governance memiliki ukuran dalam penilaian kinerja perusahaan dalam mencapai keuntungan sebuah perusahaan. Serta Corporate Governance memiliki mekanisme penilaian akuntabilitas yang transparan serta bertanggung jawab dalam mendistribusikan kesejahteraan secara merata guna mencapai peningkatan kesejahteraan.

Prinsip *Good Corporate Governance*, berisi tentang peraturan yang mengikat hak - hak pemegang saham, pemangku kepentingan dan pemenuhannya serta mengikat aturan pokok tentang pengelolaan, dan pengawasan korporasi di Indonesia, termasuk aspek etika dan manajemen risiko. Adapun prinsip - prinsip keterbukaan (*Transparency*), akuntabilitas (*Accountability*), tanggung jawab (*Responsibility*), mandiri (*Independent*), adil (*fairness*).

Transparansi dapat didefinisikan sebagai bentuk keterbukaan dalam menyalurkan informasi yang relevan serta keterbukaan dalam proses mencapai sebuah keputusan untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis. Informasi yang disediakan harus cepat, akurat dan mudah dipahami oleh para pemangku kepentingan serta dapat dibandingkan dengan kinerja keuangan dan tata kelola perusahaan.

Akuntabilitas merupakan sebuah konsep etika yang memiliki kaitan dengan pengambilan keputusan yang dapat dijelaskan dan dipertanggungjawabkan. Dengan kata lain akuntabilitas adalah sebuah prinsip yang mengatur tentang kejelasan fungsi dan implementasi organ - organ perusahaan yang dapat dipertanggung jawabkan. Menurut Adisasmita (2011) pengertian akuntabilitas adalah sebuah tanggung jawab atas konsep kegagalan dan keberhasilan tugas pokok organ perusahaan.

Responsibilitas dapat diartikan sebagai sebuah keselarasan peraturan, prinsip - prinsip, dan hukum didalam sebuah perusahaan yang diatur dalam sebuah landasan atau pedoman perusahaan. Perusahaan yang menerapkan prinsip responsibilitas harus terus mengawasi setiap organ perusahaan agar memiliki kinerja yang sesuai dengan peraturan perusahaan. Serta perusahaan wajib melaksanakan tanggung jawabnya terhadap setiap lapisan organ perusahaan, masyarakat (CSR), lingkungan sehingga keberlangsungan bisnis dapat berjalan dalam jangka yang panjang.

Adapun landasan pokok penerapan prinsip responsibilitas yaitu:

- A. Setiap organ harus berlandaskan pada prinsip manajemen risiko dan memastikan taat pada aturan undang - undang, AD ART dan peraturan perusahaan.
- B. Perusahaan harus melakukan CSR terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar perusahaan guna mencapai kepercayaan publik terhadap perusahaan.

Kemandirian dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional dan tanpa ada campur tangan kepentingan dan tekanan dari pihak manapun, atau dapat disebut sebagai perusahaan yang perlu dikelola secara objektif. Untuk dapat menerapkan prinsip-prinsip GCG, perusahaan harus dikelola secara mandiri untuk menghindari dominasi dan campur tangan dari pihak lain yang bertentangan dengan hukum. Asas kemandirian juga memastikan bahwa setiap organ perusahaan beroperasi sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perusahaan, sehingga perusahaan dapat beroperasi secara efisien dan dinamis.

Kewajaran atau kesetaraan dapat diartikan sebagai keadilan sebuah perusahaan dalam memenuhi hak - hak stakeholder dan shareholder yang terdapat pada perjanjian dan peraturan. Dengan kata lain prinsip kewajaran merupakan sebuah perlakuan perusahaan terhadap stakeholder sesuai dengan proporsi yang diatur dalam perjanjian dan peraturan undang - undang.

III. METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang diaplikasikan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. peneliti menggunakan metode kualitatif dalam penelitian ini agar dapat memahami fenomena situasi secara alami. Dalam Suatu penelitian kualitatif peneliti akan mengkaji dan melaporkan fenomena pada suatu tulisan kualitatif untuk dapat meninjau subjek penelitian secara utuh, sehingga peneliti memperoleh informasi yang terperinci mengenai Analisis Implementasi Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bogor Tegar Beriman

Subjek penelitiannya adalah Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bogor Tegar Beriman yang memiliki fokus untuk mengetahui implementasi Prinsip-prinsip good corporate governance. objek penelitian ini adalah analisis implementasi prinsip-prinsip good corporate governance Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bogor Tegar Beriman. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Teknik analisis data dilakukan dengan 3 cara yaitu reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil observasi lapangan yang telah dilakukan di Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bogor Tegar Beriman, maka peneliti akan menjabarkan hasil penelitian yang dilakukan selama proses tersebut. Bank BPRS BTB memiliki sistem penyaluran informasi yang cukup baik dari segi internal maupun eksternal. Dalam segi internal

penyebaran informasi memakai sistem horizontal yang fleksibel sehingga membuat seluruh karyawan dan stakeholder bisa mendapatkan informasi secara cepat dan akurat. Faktor penyebaran informasi yang cepat ini membuat seluruh karyawan dapat bekerja secara tepat. Dengan penyebaran informasi yang begitu cepat serta mengkampanyekan penerapan SOP dan kode etik setiap pagi kepada seluruh karyawan dan jajaran direksi yang bertujuan untuk menjaga kualitas pelayanan terhadap konsumen tetap baik. Hal tersebut juga tertuang dalam budaya perusahaan yang dimana setiap apel pagi setiap kepala bagian akan menyampaikan laporan kegiatan yang sudah atau yang akan dilakukan kemudian hari, yang membuat seluruh karyawan dan manajerial mendapatkan informasi yang sama.

Dari segi eksternal Bank BPRS BTB dengan secara lengkap memberikan informasi mengenai perusahaan yang dipublikasi lewat halaman *website* resmi perusahaan. Dengan adanya kemudahan mendapatkan akses informasi bagi masyarakat umum, maka masyarakat dapat menilai secara langsung kinerja Bank BPRS BTB yang tertuang dalam laporan keuangan tahunan yang dapat di akses di halaman *website* resmi tersebut. Dengan kemudahan mendapatkan informasi perusahaan, masyarakat dapat menilai secara langsung apakah kinerja Bank BPRS BTB sudah sesuai dengan ekspektasi calon nasabah atau belum, sehingga calon nasabah pun dapat menentukan pilihannya apakah akan menggunakan jasa Bank BPRS BTB atau tidak. Bank BPRS BTB selalu mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang bank syariah yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam hal penyampaian informasi terhadap publik yang tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31 /POJK.04/2015 Tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik. Dengan selalu mengacu terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mewajibkan Bank BPRS BTB harus memberikan informasi yang dimana dijelaskan dalam POJK No. 31 tahun 2015 mengatakan bahwa perusahaan wajib melaporkan laporan informasi atau fakta material kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan mengumumkan informasi atau fakta material kepada masyarakat. Bank BPRS BTB sendiri secara rutin dan berkala melaporkan informasi berupa fakta material atau informasi lain kepada OJK dan BPK. Bank BPRS BTB yang menjadi BUMD juga memberikan pelaporan secara rutin ke pemerintah daerah yang diwakili oleh Badan Pendapatan Daerah (BAPPENDA) dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor.. Pelaporan rutin ini biasanya bersamaan dengan agenda RUPS, yang dihadiri oleh setiap jajaran direksi, komisaris, dan shareholder. RUPS di Bank BPRS biasanya dilakukan sekurang-kurangnya satu tahun sekali untuk mengevaluasi kinerja perusahaan dan mempertanggung jawabkan kinerja selama kurang lebih satu tahun. Selain membuat laporan tahunan, BPRS BTB juga membuat laporan keuangan setiap tiga bulan sekali (triwulan).

Dengan mengikuti perkembangan zaman yang serba digital ini, Bank BPRS BTB sendiri memanfaatkan platform sosial media instagram @banksyariah_btb untuk memberikan informasi berupa kegiatan, program, campaign, dan informasi lainnya untuk disajikan kepada publik secara cepat dan akurat. Penggunaan platform media sosial ini dinilai kurang baik dari segi tanggung jawab perusahaan terhadap keterbukaan informasi kepada publik yang mana diatur dalam POJK No. 31 tahun 2015. Efek dari penggunaan sosial media antara lain adalah timbulnya kepercayaan publik terhadap Bank BPRS BTB yang dinilai transparan.

BPRS BTB juga menggunakan website resmi sebagai sarana penyalur informasi resmi, seperti laporan keuangan dan program yang dicanangkan, namun penggunaan website BPRS BTB kurang efektif dikarenakan kurang lengkapnya fitur yang diberikan pada website ini. Selama peneliti melakukan observasi di kantor Bank BPRS BTB peneliti selalu dibantu seputar pertanyaan yang akan mendukung penelitian ini, termasuk permintaan data - data yang akan mendukung penelitian ini. Data yang penulis peroleh antara lain ada laporan keuangan, *code of conduct*, payung hukum Bank BPRS BTB, serta profil perusahaan, walaupun ada beberapa data yang tidak bisa di publikasi karena masalah kerahasiaan perusahaan.

BPRS BTB selaku BUMD Termuda di Kabupaten Bogor saat ini telah mencatatkan prestasi yang luar biasa sejak kehadirannya di Kabupaten Bogor, jika melihat sejarah pembentukannya pada tahun 2017 BPRS BTB mendapatkan modal pertama sebesar Rp. 21.432.000.000 yang mayoritas modal berasal dari pemerintah daerah. Sejak mulai beroperasinya selama 7 tahun, BPRS BTB memiliki peningkatan nilai total aset yang sangat luar biasa. Peningkatan tersebut terjadi pada periode 2020,2021,2022. Selama tiga tahun tersebut peningkatan yang terjadi hampir 800% jika dibandingkan dengan modal awal yang disetorkan. Peningkatan tersebut dapat dicapai dikarenakan suksesnya program yang dijalankan oleh BPRS BTB.

Dalam hal akuntabilitas Bank BPRS BTB mencatatkan adanya peningkatan kinerja keuangan yang signifikan dalam periode 2020, 2021, 2022. Peningkatan kinerja keuangan serta aset ini diperoleh karena adanya program BUMD for UMKM yang dirancang untuk membantu perekonomian masyarakat pasca terjadinya pandemi covid 19. Program ini terbilang lancar dan mendapatkan feedback yang cukup baik dari masyarakat kabupaten bogor yang terkena

dampak ekonomi dari pandemi covid 19, dengan program pinjaman usaha UMKM yang memiliki bunga pinjaman yang kompetitif. Dengan adanya program ini masyarakat banyak tertarik untuk mengambil program ini. Banyaknya antusias masyarakat yang mengikuti program ini, memiliki dampak baik bagi kenaikan kinerja keuangan Bank BPRS BTB yang dapat dilihat pada laporan keuangan pada tahun 2022 - 2021. Pada laporan keuangan tahun 2022 tercatat adanya kenaikan total nilai aset yang memiliki kenaikan sebesar hampir 100% dari tahun 2019. Kenaikan aset tersebut berada dalam sektor pinjaman yang memiliki nilai sebesar Rp. 49.911.637.000. Kenaikan angka tersebut meningkat jika dibandingkan dari tahun 2019 yang hanya sebesar Rp. 29.310.366.000

Laporan Posisi Keuangan
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bogor Tegar Beriman
Tanggal 31 Desember 2020

(Dalam ribuan rupiah)

NO.	ASET	Posisi Tanggal Laporan	Posisi yang Sama Tahun Sebelumnya
1.	Kas Dalam Rupiah	139.307	495.036
2.	Kas dalam Valuta Asing	-	-
3.	Penempatan pada Bank Indonesia	-	-
4.	Penempatan pada Bank Lain	41.933.637	17.800.235
5.	Pinjaman	49.911.841	29.310.366
a.	Pinjaman Murabahah	46.754.668	26.760.646
b.	Pinjaman Istisna	-	-
c.	Pinjaman Multijasa	3.157.172	2.549.720
d.	Pinjaman Qardh	-	-
e.	Pinjaman Sewa	-	-
6.	Pembiayaan Bagi Hasil	5.989.898	3.718.764
a.	Mudharabah	66.667	1.447.144
b.	Musyarakah	5.923.232	2.271.620
c.	Lainnya	-	-
7.	Pembiayaan Sewa	-	-
8.	Penyisihan Penghapusan Aset	-	-
a.	Produktif	(1.197.148)	(1.494.426)
b.	Umum	(207.860)	(219.009)
c.	Khusus	(989.288)	(1.275.417)
9.	Solam	-	-
10.	Aset Istisna dalam Penyelesaian	-	-
11.	Termin Istisna -/-	-	-
12.	Persediaan	-	-
13.	Agunan Yang Diambil Alih	350.000	350.000
14.	Aset Tetap dan Inventaris	1.476.876	1.367.465
15.	Akumulasi Penyusutan dan Cadangan Penurunan Nilai -/-	940.893	763.922
16.	Aset Tidak Berwujud	-	-
17.	Akumulasi Amortisasi dan Cadangan Penurunan Nilai -/-	-	-
18.	Aset Lainnya	1.199.349	608.645
	TOTAL ASET	98.862.867	51.392.163

Seiring dengan berjalannya program BUMD for UMKM ini tentu saja memiliki efek samping, yaitu sulitnya menagih agunan kepada nasabah. Permasalahan sulitnya penagihan hutang ini membuat Bank BPRS BTB hampir mengalami kerugian yang cukup besar pada periode 2020 - 2021, namun permasalahan sulitnya penagihan agunan ini dapat diatasi dengan baik oleh pihak Bank BPRS BTB dengan menggunakan sistem kekeluargaan walau membutuhkan waktu yang tidak singkat. Dengan adanya permasalahan tersebut Bank BPRS BTB melakukan evaluasi dan membuat strategi baru yaitu berfokus pada pendanaan usaha kelas mikro (di bawah 10 milyar) yang sebagian besar didominasi oleh perusahaan yang bergerak di bidang pengadaan dan konstruksi yang mengerjakan proyek pemerintah. Perubahan strategi ini memiliki dampak yang sangat baik bagi kinerja keuangan BPRS BTB, dapat dibuktikan dari laporan keuangan 2021 - 2022 yang mengalami kenaikan nilai total aset yang signifikan. Evaluasi yang diadakan saat berjalannya RUPS ini membuahkan hasil yang baik, program yang dirancang dengan memfokuskan pendanaan usaha kelas mikro ini berjalan dengan sangat baik.

BPRS BTB selaku Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memiliki tanggung jawab untuk membantu masyarakat dalam bidang perekonomian, sebagaimana BPRS BTB didirikan dengan tujuan untuk membantu masyarakat Kabupaten Bogor dalam membangun perekonomian dan menambahkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bogor. Peran BPRS BTB di mata masyarakat Kabupaten Bogor dalam kurun waktu tiga tahun kebelakang sangat besar, dikarenakan adanya program BUMD for UMKM yang dijalankan oleh BPRS BTB. BUMD for UMKM adalah program pendanaan usaha UMKM (dibawah 200 juta) yang dirancang dan dijalankan pada saat pandemi covid 19 berlangsung. Tujuan adanya program ini adalah untuk membantu masyarakat yang terkena dampak pandemi covid 19 dapat memulai kembali usaha mereka, tentu saja tujuan lainnya adalah untuk memutar kembali roda perekonomian di wilayah Kabupaten Bogor.

BPRS BTB juga selaku BUMD yang sebagaimana mestinya dengan tujuan utama yaitu membantu pemerintah daerah untuk mendapat tambahan Penghasilan Asli Daerah (PAD) mewajibkan memberikan dividen terhadap pemegang saham yaitu pemerintah daerah Kabupaten Bogor dan ibu Dewi Megawati. Pembagian dividen ini

dilaksanakan pada bulan desember saat penutupan buku laporan keuangan tahunan yang berlangsung dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Pembagian dividen terhadap pemegang saham sesuai dengan jumlah penanaman modal awal. Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/POJK.03/2021 Tentang Kebijakan bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah Sebagai Dampak Penyebaran CoronaViruses Disease 2019 yang tertuang dalam Pasal 7B tentang Kebijakan Pembagian Dividen dan/atau Tantiem. Selama periode 2020 - 2022 pembagian dividen kepada shareholder mengalami peningkatan selama pandemi covid 19.

Badan Usaha Milik daerah (BUMD) yang berbentuk Perusahaan terbatas, sesuai dengan amanat UU No.40 tahun 2007 yang mengacu pada UU No. 5 tahun 1962 tentang perusahaan daerah, peran pemerintah daerah selaku pemegang saham hanya sebatas mencakupi sebagai pemegang saham yang dilakukan saat Rapat Umum Pemegang Saham, yang saat ini peran pemerintah Kabupaten Bogor diwakili oleh BAPPENDA dan BPKAD selaku pengelola keuangan di Kabupaten Bogor. Badan Usaha Milik daerah yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang dikelola oleh jajaran direksi memiliki kewenangan penuh dalam pengelolaan perusahaan, artinya jajaran direksi selaku pengelola perusahaan mendapatkan kewenangan penuh dalam mengelola perusahaan secara baik tanpa dapat diganggu oleh pihak manapun.

Dari prinsip keterbukaan yang telah diterapkan oleh BPRS BTB, peneliti menemukan bahwa masih adanya kekurangan dalam penerapan prinsip keterbukaan ini. Kurangnya pemanfaatan media online dalam penyebaran informasi ini yang menjadi titik vital dalam penerapan prinsip GCG. di halaman website resmi BPRS BTB masyarakat hanya bisa melihat laporan keuangan tahun 2023 saja, sedangkan seharusnya yang sebagaimana diatur dalam POJK No.31 tahun 2015 yang berbunyi tentang keterbukaan informasi kepada publik yang ditayangkan melalui halaman website resmi. Selain pelaporan keuangan yang tidak lengkap, di halaman website resmi juga kurang update mengenai informasi baru tentang kegiatan atau program yang baru atau akan rencanakan kepada publik, sehingga membuat halaman berita dari website resmi kosong.

Pada sosial media instagram pun mengalami masalahnya yang sama, konten yang tersedia pada sosial media instagram di dominasi oleh ucapan selamat akan sesuatu dan edukasi mengenai tata kelola keuangan, sedangkan konten yang berisi tentang informasi dan program tidak lebih banyak dari konten yang lain. Sehingga membuat penggunaan sosial media ini kurang efektif dalam penyebaran informasi mengenai program kerja BPRS BTB. selain itu kurangnya informasi mengenai audit kinerja juga sulit didapatkan oleh masyarakat, padahal BPRS BTB yang dimana adalah perusahaan BUMD memiliki kewajiban untuk melaporkan segala jenis informasi dan audit kepada masyarakat. Serta terdapat kurangnya peran pengawasan dari masyarakat terhadap kinerja BPRS BTB ini juga yang membuat BPRS BTB merasa informasi tersebut susah untuk didapatkan.

Dari segi akuntabilitas yang telah dipaparkan di atas peneliti menemukan bahwa penerapan tata kelola keuangan yang dilakukan oleh BPRS BTB sudah cukup baik, dapat dilihat dari laporan keuangan tiga tahun kebelakang yang selalu mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut karena program kerja yang direncanakan dan diterapkan sudah sangat baik. Seperti program BUMD for UMKM, walaupun mengalami beberapa kendala tetapi program ini dapat terbilang berhasil karena pada tahun 2020 yang tertera pada laporan keuangan mengalami peningkatan yang signifikan jika dibandingkan dengan laporan keuangan tahun 2019. Bukan hanya dari segi keuangan saja, tapi dari segi trust customer masyarakat yang mengikuti program BUMD for UMKM ini menilai bahwa kinerja BPRS BTB dinilai cukup baik dari segala aspek, mulai dari pelayanan yang baik hingga bunga yang kompetitif yang membuat customer yang puas ini dapat memberikan rekomendasi kepada masyarakat untuk menggunakan layanan perbankan BPRS BTB.

Branding dan kualitas pelayanan yang baik juga menjadi aspek penting dalam mempertahankan tingkat kelayakan customer, BPRS BTB juga memprioritaskan pelayanan terhadap customer yang loyal dengan BPRS BTB demi menjaga reputasi dan customer trust, tentu saja hal ini bukan hanya untuk customer yang loyal saja melainkan untuk semua customer. Dengan adanya promosi yang menarik untuk nasabah yang membuat engagement customer lebih kuat.

Dari paparan di atas BPRS BTB sebagai BUMD selalu berkomitmen dalam memberikan kontribusi kepada pemerintah Kabupaten Bogor yang berbentuk dividen yang disetorkan kepada BAPPENDA sebanyak satu tahun sekali. Pemberian dividen tersebut sesuai dengan maksud dan tujuan awal dibentuknya BPRS BTB yaitu selain membantu perekonomian masyarakat Kabupaten Bogor dan juga menjadi penghasilan tambahan bagi pemerintah Kabupaten Bogor yang tertuang dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD). walaupun tugas tugas utama BPRS BTB sudah tercapai tetapi masih ada kekurangan, yaitu kurangnya perhatian langsung kepada masyarakat Kabupaten Bogor yang berbentuk CSR

Kurangnya program CSR dikarenakan ada kurangnya kesadaran dari pihak jajaran direksi dan karyawan akan perhatian langsung terhadap masyarakat, merasa tanggung jawab utama sudah dilaksanakan membuat BPRS BTB terlena akan perhatian langsung terhadap masyarakat. Program CSR sudah beberapa kali direncanakan namun hingga saat ini program tersebut belum terealisasi. Dari paparan di atas BPRS BTB yang memiliki payung hukum dan otonomi sendiri sudah cukup bagi peneliti, walaupun BPRS BTB ini merupakan sebuah produk politik pada masa kepemimpinan bupati terdahulu. Namun BPRS BTB tetap melakukan kinerja yang berlandaskan asas profesionalitas yang baik.

Budaya perusahaan islamiah yang kuat ini membuat karyawan bekerja secara efisien dan terarah. Budaya islamiah ini menjadi salah satu faktor utama karyawan tidak melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang dari hukum agama. Selain itu penerapan SOP dan Kode Etik yang tegas juga menjadi faktor paling kuat bagi karyawan dalam menjaga kinerja yang tidak melanggar ketentuan yang ada. Namun peneliti menemukan masih ada tindakan nepotisme dalam proses rekrutmen pegawai yang terjadi di BPRS BTB.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Penerapan prinsip-prinsip good corporate governance menjadi hal yang wajib dilakukan oleh setiap perusahaan terutama di bidang perbankan, karena pentingnya penerapan good corporate pada perusahaan, maka BPRS BTB selaku BUMD juga menerapkan prinsip tersebut. Dari hasil penelitian yang peneliti ambil selama proses observasi, maka dari itu peneliti akan menyimpulkan bagaimana cara BPRS BTB menerapkan prinsip-prinsip good corporate governance.

Peneliti menyimpulkan bahwa penerapan prinsip-prinsip good corporate governance yang dilakukan oleh BPRS BTB sudah cukup baik, namun ada beberapa point yang harus ditingkatkan lagi seperti, penggunaan sosial media instagram yang lebih informatif dan interaktif bagi masyarakat sehingga perlu lebih banyak konten mengenai program kerja, campaign, dan edukasi mengenai perusahaan kepada masyarakat. Dan penyebaran informasi pada halaman web yang lebih update, karena hingga saat ini konten yang terdapat dalam web hanya sebatas informasi formal saja.

REFERENSI

- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). Metode Penelitian Kualitatif. Sukabumi: CV Jejak.
- Haryono, C. G. (2020). Ragam Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi. Sukabumi: CV Jejak, anggota IKAPI.
- Manzilati, A. (2017). Metode Penelitian Kualitatif: Paradigma, Metode, dan Aplikasi. Malang: Universitas Brawijaya Press (UB Press).
- Serius, N, Kurniawan. S. Z, & Natalia. K. L (2022) Analisis Implementasi Good Corporate Governance (GCG) dalam upaya Meningkatkan Manajemen Operasi Pelayanan di PT. Liquid Kencana Abadi